

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di zaman reformasi yang berlangsung saat ini di Indonesia masyarakat menuntut agar pemerintahan mampu mengelola otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih baik. Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tiga misi utama otonomi daerah adalah menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan Mardiasmo, (2002) dalam Wahyuni, (2014). Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan (Bastian, 2006). Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, Wahyuni (2014).

Dalam organisasi yang mengelola dana masyarakat, pemerintah harus mampu memberikan pertanggungjawaban pada masyarakat melalui laporan keuangannya. Semakin baik pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan maka akuntabilitas laporan keuangan pemerintah akan meningkat. Untuk meningkatkan akuntabilitas publik, pemerintah perlu mengakses laporan keuangan yang dibuatnya agar masyarakat dengan mudah memperoleh laporan keuangan tersebut. Aksesibilitas merupakan suatu cara untuk memperoleh informasi laporan keuangan dengan mudah melalui media seperti, surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website. Perbedaan penelitian ini dengan yang terdahulu adalah studi empirisnya yaitu

menggunakan Pemerintahan Kabupaten Bandar Lampung. Dengan pendapatan yang tinggi pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan dengan jelas, mudah dipahami publik dan memberikan informasi kepada masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat. Kenyataannya pemerintah Kabupaten Bandar Lampung belum mampu menyediakan semua informasi keuangan secara terbuka kepada public, Wahyuni (2014).

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar Koester (2014). Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan Mulyana (2006). Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah Wahyuni (2014). Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan *website* (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat Wahyuni (2014).

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2003). *GASB* menjelaskan keterkaitan akuntabilitas dan pelaporan keuangan bahwa akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah, data yang secara

periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh *agent* yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi Shende dan Bennet (2004) dalam Wahyuni (2014).

Reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung di Indonesia telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Salah satu agenda reformasi yaitu adanya otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut di tandai dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Magdalena (2016).

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang telah disebutkan di atas membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Sebagai operasionalnya maka Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59, Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan Pemerintah Pusat yang memberlakukan otonomi daerah merupakan langkah yang konkrit dalam mewujudkan desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Maksud dari Pemerintah Pusat memberikan hak otonomi kepada pemerintah

daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Seiring adanya pemberlakuan otonomi daerah oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab yang lebih besar untuk mendayagunakan potensi daerahnya masing-masing demi memajukan daerah tersebut Safitri (2009) dalam Wahyuni (2014).

Cara yang ditempuh untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah dengan mengharuskan pemerintah untuk menyusun suatu laporan keuangan yang dilakukan dengan melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan daerah. Agar akuntabilitas dapat terjamin, diperlukan suatu sistem akuntansi yang baik, sistem tersebut dijalankan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Sistem akuntansi keuangan daerah bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana. Selain itu, sistem akuntansi keuangan daerah menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Magdalena (2016).

Fenomena yang ada dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP untuk ke-6 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Lampung karena dinilai baik dalam mengelola keuangan daerah tahun 2015."Pekot Bandar Lampung tergolong baik dalam mengelola keuangan daerah. Meskipun sistem pembuatan LKPD telah berubah dari berbasis kas ke akrual, namun Pekot Bandar Lampung masih mampu mempertahankan opini WTP," kata Kepala BPK RI Provinsi Lampung Sunarto, di Bandar Lampung, Selasa. Dalam sistem baru yang berbasis akrual, menurutnya, terdapat tujuh kelompok laporan yang mesti disampaikan, yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca

(Ner), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Ia melanjutkan, opini BPK terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) itu hanya empat, yakni WTP, Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, dan Tidak Memberi Pendapat ([www.antaralampung.com](http://www.antaralampung.com) Selasa, 15/11/2016 15:35 WIB).

WTP merupakan penghargaan terbaik, dan beberapa tahun belakangan berhasil diraih Pemkot Bandar Lampung. Terkait kewajiban Pemkot Bandar Lampung berupa utang sejumlah Rp. 200 miliar yang hingga kini belum dibayarkan, dirinya menjelaskan bahwa dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bandar Lampung tahun 2015 sudah menyebutkan hal tersebut. "Prinsip dasar dalam audit BPK adalah transparansi. Tidak masalah Pemkot berutang, selama prosesnya dilaporkan dalam laporan keuangan," kata dia lagi. Wali Kota Bandar Lampung Herman HN mengatakan pihaknya sangat berterima kasih kepada BPK RI Provinsi Lampung yang telah memberikan opini WTP ini. "Pencapaian ini tentunya berkat kerja sama dari semua pihak, sehingga kita bisa meraih predikat WTP," kata dia. Setelah mendapatkan predikat itu, pihaknya akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah bersama jajarannya, termasuk pengelolaan aset daerah yang dimiliki Pemkot setempat. Meskipun ada catatan dari auditor BPK, dia mengatakan, semua itu akan menjadi motivasi agar ke depan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Pemkot Bandar Lampung dapat lebih baik lagi. ([www.antaralampung.com](http://www.antaralampung.com))

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Wahyuni (2014) yang meneliti "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah". Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, yaitu adanya penambahan satu variabel independen yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang merupakan replika dari penelitian Magdalena (2016). Sistem akuntansi keuangan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara

manual atau menggunakan aplikasi computer Magdalena (2016). Dengan alasan karena pemerintah baru menerapkan sistem keuangan daerah berbasis akrual, yang dimana sistem tersebut baru diterapkan dilingkungan pemerintah yang diharapkan dapat mempertahankan Opini WTP tersebut.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat terwujud jika setiap entitas pemerintah daerah dapat menciptakan, mengoperasikan, dan memelihara Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah yang tepat sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Dengan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik akan mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Magdalena (2016).

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menambahkan variabel independen yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penyajian, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”**.

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

### **Tempat dan waktu penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan data pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Bandar Lampung pada tahun 2016.

### **Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik perumusan masalahnya yaitu sebagai berikut :

1. Apakah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
3. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

### **1.4 Tujuan Masalah**

Adapun tujuan dari masalah ini adalah :

1. Untuk mengetahui secara empiris seberapa besar pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui secara empiris seberapa besar pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui secara empiris seberapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan antara lain:

1. Bagi Pihak Eksternal

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan memahami tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, menambah pengetahuan tentang aksesibilitas laporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah SKPD.

## 2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi, yaitu menjadi literatur bagi mahasiswa dalam mempelajari pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah SKPD.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Membahas mengenai gambaran ringkasan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam bab pendahuluan ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

#### **BAB IV : HASIL DAN ANALISIS**

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil penelitian.

#### **BAB V : SIMPULAN & SARAN**

Bab ini membahas kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**